

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai tingkat kemiskinan cukup tinggi, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 29,13 juta jiwa atau 11,96 % dari jumlah penduduk Kementerian Sosial (2016 : 1). Proses pembangunan yang belum merata, merupakan salah satu masalah yang sulit untuk dituntaskan hingga saat ini juga. Kemiskinan secara singkat dapat didefinisikan sebagai suatu masih rendahnya standart hidup dari masyarakat atau dapat dikatakan adanya suatu tingkat kekurangan materi dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan kata lain kemiskinan merupakan keadaan dimana ketidakmampuan masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok untuk memenuhi hak-hak dasar secara layak dan dapat mengembangkan kehidupan yang lebih bermartabat Kementerian Sosial (2016 : 4).

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 saja untuk lingkup nasional, tingkat kemiskinan penduduk paling tinggi di Indonesia ada di Pulau Jawa yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur 4.775,97 juta jiwa, Jawa Tengah 4.577,04 ribu jiwa dan Jawa Barat sebesar 4.435,70 ribu jiwa (www.bps.co.id). Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin yang terdapat pada Pulau Jawa yang terbilang cukup banyak, hal ini menuntut peran dari pemerintah pusat dan

daerah untuk lebih menekan tingkat kemiskinan pada masyarakat. Berikut ini merupakan tabel dengan jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Jawa Timur ialah sebagai berikut :

**Tabel 1 : Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur
Tahun 2010-2015**

	Jumlah Penduduk Miskin			Presentase Perkotaan dan Pedesaan
	Kota	Desa	Perkotaan dan Pedesaan	
2010	1.873,5	3.587,98	5.529,30	15,26%
2011	1.768,23	3.614,34	5.388,97	14,27%
2012	1.639,65	3.459,35	5.099,01	13,40%
2013	1.561,45	3.243,56	4.805,01	12,55%
2014	1.535,81	3.250,98	4.786,79	12,42%
2015	1.524,62	3.264,50	4,789,12	12,34%

Sumber : www.bps.go.id

Menurut data jumlah penduduk miskin yang ada di Jawa Timur tersebut dalam kurun waktu lima tahun tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan. Tingkat penurunan kemiskinan yang ada di Jawa Timur dalam kurun tahun 2010 sampai 2015 cenderung menurun yang dapat dilihat dalam lingkup pedesaan maupun perkotaan. Dapat dilihat menurut penjelasan bagan, pada tahun 2010 tingkat kemiskinan masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Timur antara pedesaan dan perkotaan menjadi yang paling tinggi dengan total 5.529,30.

Sedangkan tahun dimana tingkat kemiskinan terendah ada di tahun 2015 dengan jumlah totalnya 4,789,12. Kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur menjadi paling tinggi karena memang jumlah penduduk di Jawa Timur pada tahun 2015 sebanyak 38,85 juta jiwa.(*www.bps.co.id*). Kemiskinan di Jawa Timur yang tersebar di wilayah kabupaten atau kota seperti yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat dilihat dengan tabel presentase jumlah penduduk miskin yang ada di Bojonegoro. Merujuk pada data resmi Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) menunjukkan angka kemiskinan ialah sebagai berikut :

**Tabel 2 : Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2010-2015**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase (%)
2010	227,2 ribu jiwa	18,78%
2011	212,9 ribu jiwa	17,50%
2012	203,3 ribu jiwa	16,60%
2013	196,0 ribu jiwa	15,95%
2014	190,8 ribu jiwa	15,48%
2015	193,9 ribu jiwa	15,71%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda)

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sumber daya alam di Kabupaten Bojonegoro yang cukup besar ialah minyak dan gas bumi. Kabupaten Bojonegoro sendiri menjadi daerah yang menyumbang

kebutuhan minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam yang berupa minyak dan gas bumi yang ada di Bojonegoro sendiri tidak membuat permasalahan kemiskinan yang di Bojonegoro terselesaikan. Kemiskinan yang ada di Bojonegoro sendiri terdiri dari perkotaan maupun pedesaan. Masih tingginya tingkat kemiskinan yang ada, maka dibutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin. Menurut Izzedin dalam Assegaf (2015 : 34) “Saat ini yang dibutuhkan agar program-program penanggulangan kemiskinan dapat memberikan hasil yang nyata, tak pelak adalah bagaimana menggempur akar-akar kemiskinan hingga tuntas (*attacking the roots of poverty*)”.

Upaya pemberdayaan masyarakat miskin, pemerintah dalam hal ini selalu memaksimalkan program yang dibuat untuk menekan kemiskinan yang ada pada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan bahwa “Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. ”Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengamanatkan tentang kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, serta dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Kementrian Sosial yang melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan yang mana membuat kebijakan nasional melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan pemberdayaan secara berkelompok dengan adanya pendampingan sosial. Pemberdayaan sosial masyarakat miskin merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Kementerian Sosial 2016 : 5).

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya aktifitas sosial ekonomi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial mereka, yang mana melalui kelompok dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan Kementerian Sosial (2014 : 11). Pembentukan KUBE didasari oleh kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber atau keadaan geografis serta latar belakang kehidupan budaya, memiliki motivasi yang sama. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaksanaannya dilakukan pendampingan. Pendampingan sosial merupakan suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan KUBE, dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja dan fasilitas pelayanan publik Kementerian Sosial (2014 : 7).

Menurut Kementerian Sosial (2016 :4-5) program Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini dapat dijadikan media dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Dapat dijadikan sasaran yang efektif bagi masyarakat miskin untuk mengatasi berbagai keterbatasan seperti kepemilikan modal, informasi, teknologi dan lainnya secara bersama-sama dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial hidupnya.
- b. Melalui sistem KUBE ini dapat menumbuh kembangkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kepedulian dan kesetiakawanan sosial baik diantara masyarakat miskin maupun masyarakat luas.
- c. Melalui sistem KUBE ini memudahkan bagi para pihak yang memberdayakan mereka dalam pelaksanaan pembinaan maupun monitoring, dengan demikian pelaksanaannya akan lebih efektif dan efisien baik dari segi pemberdayaan, tenaga dan waktu yang digunakan. .

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu penerima dana bantuan dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berasal dari usulan Dinas Sosial yang ada di kabupaten kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Menurut Ibu Dwi Harningsih selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro ialah

“Proses dari pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dimulai dari pengajuan atau pengusulan beberapa proposal yang dilaksanakan oleh desa atau kelurahan yang nantinya dikirim ke Dinas Sosial dan nantinya akan dipilih oleh Kementerian Sosial. Pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada masyarakat miskin tentunya masih terjadi kendala yang dihadapi”. (Wawancara 15 April 2017 pada pukul 11.30 WIB)

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini memang perlu ditangani agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini adalah masih

rendahnya kesadaran anggota dalam kelompok. Dalam hal ini masing-masing anggota dalam menyadari peran dan tugas mereka dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pada dasarnya kendala yang dihadapi ini akan mempengaruhi pelaksanaan program KUBE ini masih berjalan belum efektif. Sehingga pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan belum dapat terselesaikan secara optimal.

Selain itu juga dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro mempunyai permasalahan. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bojonegoro ini merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan adanya pemberdayaan masyarakat berdasarkan wilayah atau tempat tinggal. Program KUBE ini dibagi menjadi KUBE yang ada di pedesaan dan KUBE yang ada di perkotaan. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di perkotaan cenderung tidak berjalan dengan baik, pada awalnya saja program KUBE ini berjalan tetapi dengan adanya permasalahan yang ada dimasing-masing anggota membuat KUBE yang ada di perkotaan yang berjalan hanya simpan pinjam. Sedangkan KUBE yang ada di pedesaan sudah berjalan dengan baik karena usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan keadaan wilayah seperti sumber daya alam yang melimpah.

Penelitian ini membahas mengenai implementasi atau pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Usaha Bersama (KUBE) mempunyai alasan, karena masalah kemiskinan yang pada masyarakat merupakan permasalahan yang belum ditemukan penyelesaian yang tepat

dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dengan meneliti bagaimana pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bojonegoro. Peneliti dalam hal ini juga menganalisis dari implementasi Program Kelompok Usaha (KUBE) ini dapat membantu masyarakat miskin dalam peningkatan kesejahteraan. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini merupakan kelompok yang menerima dana bantuan stimulan dari program KUBE dengan UEP bergerak diberbagai macam bidang, seperti bidang ternak kambing. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ada di Kabupaten Bojonegoro dimulai pada saat Dinas Sosial di Kabupaten Bojonegoro mulai dibentuk. Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang sudah dijelaskan, penelitian ini menggunakan judul **“Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin ”** dengan tujuan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka berikut ini merupakan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yang dapat diketahui sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan masyarakat miskin ?

2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan atau implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan masyarakat miskin ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, mempunyai tujuan yang dapat diketahui ialah sebagai berikut ini :

1. Mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan atau implementasi dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan atau implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik yang dapat dilihat dari segi akademis maupun dari segi praktis yang dapat diketahui sebagai berikut ini :

1. Kontribusi Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan ide atau gagasan pemikiran yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan pada masyarakat melalui program pemberdayaan.

- b. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan ide atau gagasan yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan publik, pelaksanaan atau implementasi kebijakan dan peran aktor dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide atau gagasan pada Pemerintah Daerah terutama Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan dari Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memaksimalkan pemberdayaan masyarakat miskin.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini dibuat dengan tujuan agar dapat dan memudahkan pembaca untuk mengerti. Masing-masing bab secara jelas dan sistematika penulisan ini secara garis besar dibagi menjadi lima bab yang akan dijelaskan dimasing-masing bab. Berikut ini merupakan penjelasan yang ada dimasing-masing bab ialah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini secara umum menjelaskan atau menguraikan tentang penelitian yang dilakukan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini peneliti menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan

program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini secara umum menjelaskan tentang berbagai kajian teori yang digunakan atau berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Bab ini menjelaskan tentang teori implementasi kebijakan, implementasi program, pemberdayaan masyarakat, kemiskinan dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini secara umum menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, keabsahan data dan analisis data. Bab ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian dan mempermudah peneliti untuk proses analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yang ada di lapangan yang berkaitan dengan implementasi dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Serta mengetahui analisis data yang sudah diperoleh dari penelitian yang sudah dilaksanakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian yang ada di lapangan. Selain itu dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, peneliti juga dapat memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk pihak-pihak terkait.